

Inkonsistensi Legalitas Penggunaan Dekstrometorfan Sebagai Produk Turunan Morfin dalam Obat Batuk = Legal Inconsistency of Consuming Dextrometorphan as a Morphine Derivative Product for Cough Medicine

Riva Mahfuzhah Saphira, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920555938&lokasi=lokal>

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai penggunaan Dekstrometorfan yang merupakan produk turunan Morfin, dimana telah terdapat inkonsistensi terhadap legalitas penggunaannya dalam obat batuk. Obat Legalization batuk yang mengandung Dekstrometorfan yang merupakan produk turunan Morfin dapat menimbulkan efek mabuk apabila dikonsumsi dengan dosis berlebih. Sehingga, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Dekstrometorfan Sediaan Tunggal untuk melakukan penarikan izin edar terhadap obat batuk tersebut. Kemudian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI kembali mengeluarkan peraturan, yakni Peraturan BPOM No. 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Obat – Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan dengan tujuan untuk pengawasan yang lebih ketat. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan penggunaan zat Dekstrometorfan dengan benar. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif serta data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya kepastian hukum terhadap legalitas dari penggunaan obat batuk tersebut yang mengandung Dekstrometorfan untuk mencegah terjadinya inkonsistensi terhadap penerapan regulasi serta terjadinya penarikan izin edar, dimana pengkajian dapat dilakukan dengan menggunakan teori serta peraturan hukum yang berlaku selama tidak bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Penarikan izin edar obat batuk pada dasarnya dapat berdampak pada masyarakat yang mengalami sakit batuk kering karena dapat mengganggu hak atas kesehatannya, sehingga perlu ketegasan dalam penerapan kebijakan oleh pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI terhadap penggunaan Obat Batuk yang mengandung Dekstrometorfan untuk dapat mencapai tujuan dari hukum kesehatan.

.....This study discusses the use of Dextrometorphan which is the derivative product of Morphine, where an inconsistencies has occur in the legality of its use in cough medicine. Cough medicine that contains Dextrometorphan which is the derivative product of Morphine can cause hangover due to excess doses consumption. This has caused Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI released Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Dekstrometorfan Sediaan Tunggal to withdraw the distribution permit of the cough medicine. Then, BPOM RI again released another regulation namedly Peraturan BPOM No. 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Obat – Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan for the purpose of a stricter monitoring. This study aims to describe the correct use of Dextrometorphan. The research method that used is judicial-normative, the research type is descriptive, and the data being obtained from literature studies and interviews. This study shows that there is a need for legal certainty regarding the legality of this medicine to prevent an inconsistencies in the application of the regulations and its distribution permit withdrawal. The study can be carried out using theories and applicable legal regulations

as long as not conflicted with the higher legal rules. The withdrawal can basically gave an impact towards the right to health of the people with dry cough. So, BPOM RI should be firm in the application of the policies to achieve the goals of health law.